



Penerimaan PBB Kota Yogya Baru 20 Persen

Yulianingsih

YOGYAKARTA — Meski sudah memasuki bulan keenam atau akhir semester satu 2014, namun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogyakarta masih sangat rendah. Hingga saat ini, realisasi pendapatan dari PBB baru mencapai 20 persen dari target yang ditentukan.

"Hingga Mei 2014 ini, capaian PBB Kota Yogya baru mencapai Rp 8,5 miliar atau 20 persen dari target tahun ini

yang mencapai Rp 46,7 miliar," jelas Sekda Kota Yogyakarta, Titik Sulastrri, dalam pembukaan Pekan Panutan Pembayaran PBB di pendopo Balai Kota Yogyakarta, Selasa (3/6).

Untuk itu, dia berharap masyarakat dapat membayar PBB lebih awal, tidak harus menunggu batas akhir pelunasan PBB. Untuk itu, pihak Pemkot sudah membagikan 91.500 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) PBB kepada WP. Besaran jumlah terutang PBB tersebut

mencapai Rp 50,7 miliar.

Menurutnya, pendapatan negara dari sektor pajak seperti PBB harus dioptimalkan karena menjadi salah satu pendapatan utama pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan. "Kegiatan pekan panutan pembayaran PBB ini rutin diadakan sebagai keteladanan. Harapannya dapat mendorong wajib pajak lain untuk membayar lebih awal," katanya.

Sekda Kota Yogyakarta Titik Sulastrri yang membayar PBB pertama dalam Pekan

Panutan Pembayaran PBB kemarin mendapatkan hadiah doorprize setrika listrik.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengeolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono, mengatakan meskipun realisasi pembayaran PBB baru mencapai Rp 8,5 miliar, tapi dia optimistis target pendapatan PBB dapat tercapai di akhir jatuh tempo. Hal ini karena kecenderungan WP melunasi PBB biasanya saat mendekati jatuh tempo sekitar September.

Dia juga menyebutkan,

target realisasi PBB tahun ini yang ditetapkan sebanyak Rp 46,7 miliar memiliki selisih dengan besaran piutang PBB Rp 50,7 miliar. "Target memang berbeda dengan realisasi SPT terutang. Ini karena dinamika setiap tahun ada WP yang tidak bisa kita jangkau. Misalnya pindah domisili atau pemilik rumah ganti," katanya.

Salah satu cara mendorong pembayaran PBB agar bisa lebih awal, adalah dengan menggelar Pekan Panutan Pembayaran PBB. Dalam acara ini ada 305 WP yang di-

undang dengan nilai pembayaran PBB sebesar Rp 5,2 miliar. WP itu adalah mereka yang memiliki PBB terutang di atas Rp 500 ribu.

Para WP yang sudah membayar pajak juga berhak mengambil undian doorprize dengan hadiah berbagai barang elektronik. "Masyarakat juga bisa membayar PBB di wilayah-wilayah. Untuk di kecamatan ada loket Bank BPD DIY. Di kelurahan dilayani oleh petugas DPD PK," katanya.

■ ed: eko widiyatno

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005